

**PERSIAPAN GURU SD UNTUK MENERAPKAN KURIKULUM MERDEKA TAHUN 2022: SEBUAH STUDI FENOMENOLOGI*****THE PREPARATION OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS TO IMPLEMENT THE MERDEKA (INDEPENDENT) CURRICULUM IN THE YEAR 2022: A PHENOMENOLOGICAL*****Ervian Arif Muhafid<sup>1)</sup>, Heri Retnawati<sup>2)</sup>**<sup>1</sup>Pendidikan Olahraga, FKIP, Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen<sup>2</sup>Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Fakultas Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta<sup>1</sup> rvian.a.muhaqid@umnu.ac.id

Naskah diterima tanggal 15-11-2022, direvisi tanggal 8-12-2022, disetujui tanggal 27-12-2022

**ABSTRAK**

Perkembangan dan kemajuan teknologi mengisyaratkan perlu diperbaikinya kurikulum di sekolah. Di Indonesia, tahun 2022 akan diterapkan kurikulum baru yang dinamai dengan kurikulum Merdeka. Pada kurikulum ini, difasilitasi pembelajaran yang melatih kemampuan siswa sesuai kebutuhannya atau yang dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Penelitian ini bertujuan untuk memotret/menganalisis kesiapan guru dalam mengujicoba/mengimplementasikan kurikulum merdeka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis fenomenologi. Partisipan penelitian ini diwakili oleh guru SD dari wilayah Indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur Indonesia. Data dikumpulkan melalui angket dengan bantuan google form yang dilanjutkan dengan wawancara untuk partisipan yang terpilih. Teknik Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan Bogdan dan Blikem dengan tiga langkah, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Temuan menunjukkan pemahaman guru berkaitan dengan kurikulum merdeka sebagai kurikulum yang didesain lebih fokus dan fleksibel sesuai dengan potensi siswa menyesuaikan dengan kondisi satuan Pendidikan. Sedikit guru yang belum memahami dan mengerti adanya kurikulum merdeka. Persiapan yang dilakukan guru sejauh ini mengenal kurikulum merdeka secara mendalam melalui berbagai media serta mengikuti sosialisasi secara luring maupun daring. Hambatan yang dihadapi oleh guru dalam mempersiapkan penerapan kurikulum merdeka adalah kurangnya perangkat pendukung, motivasi dan kompetensi diri guru serta dukungan dari ekosistem sekolah. Kata kunci: guru SD, kurikulum baru, kurikulum merdeka

**ABSTRACT**

*Technological developments and advances indicate the need to improve school curricula. In Indonesia, in 2022, a new curriculum will be implemented, which is called the Merdeka curriculum. This curriculum facilitates learning that trains students' abilities according to their needs, known as differentiated learning. This study aims to photograph/analyze the readiness of teachers in testing/implementing the Merdeka curriculum. This research is qualitative research with the type of phenomenology. The participants of this study were represented by elementary school teachers from the western, central, and eastern parts of Indonesia. Data was collected through a questionnaire with the help of Google Forms, followed by interviews with the selected participants. The data analysis technique was carried out qualitatively according to Bogdan and Blikem with three steps: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The findings show that teachers' understanding is related to the Merdeka*

*curriculum as a curriculum that is designed to be more focused and flexible in accordance with the potential of students to adapt to the conditions of the education unit. Few teachers do not understand the existence of the Merdeka curriculum. The preparations made by teachers so far are getting to know the Merdeka curriculum in depth through various media and participating in offline and online socialization. The obstacles teachers face in preparing for the Merdeka curriculum are the lack of supporting tools, motivation and self-competence of teachers, and support from the school ecosystem.*

*Keywords: elementary school teacher, new curriculum, merdeka curriculum*

## PENDAHULUAN

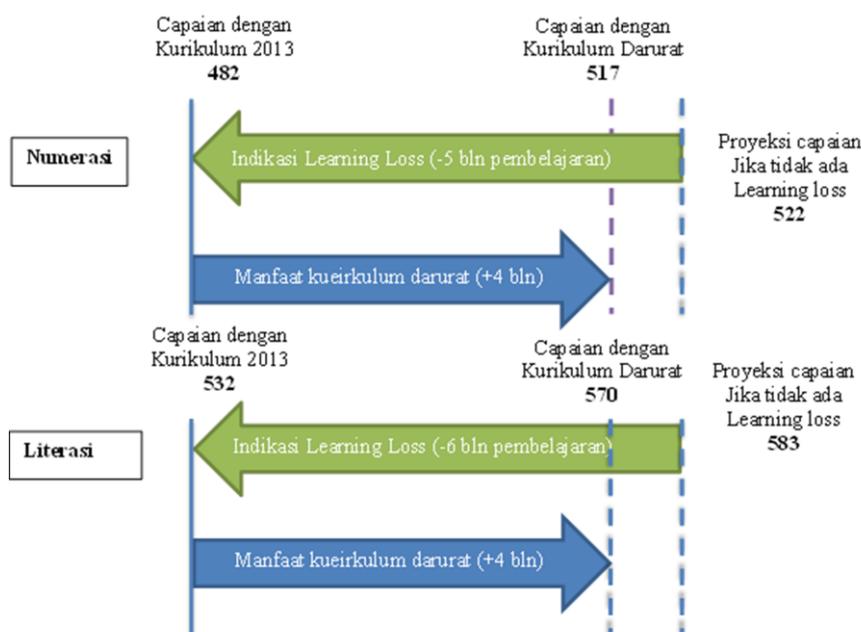
Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan menjadi tantangan utama dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan ini, sejak 2009 Pemerintah telah memenuhi kewajiban anggaran pendidikan sebesar 20% APBN serta terus meningkatkan anggaran pendidikan dari Rp 332,4 T pada 2013, menjadi Rp 550 T pada 2021 (Kementerian Keuangan, 2021). Namun demikian, berbagai indikator hasil belajar siswa belum menampakkan hasil yang menggembirakan berbagai pengukuran hasil belajar siswa menunjukkan masih relatif rendahnya kualitas hasil belajar di Indonesia. Pun demikian, tidak terjadi peningkatan kualitas pembelajaran yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada konteks inilah pendidikan di Indonesia tengah mengalami krisis pembelajaran, yang apabila tidak segera ditangani akan menguatkan apa yang disampaikan (Pritchett & Beatty, 2015) sebagai *schooling ain't learning*: bersekolah namun tidak belajar.

Krisis pembelajaran yang telah terjadi sekian lama tersebut, diperburuk dengan Pandemi Covid-19 yang seketika membawa perubahan pada wajah pendidikan di Indonesia. Perubahan yang paling nyata tampak pada proses pembelajaran yang awalnya bertumpu pada metode tatap muka beralih menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ). Intensitas belajar mengajar juga mengalami penurunan yang signifikan, baik jumlah hari belajar dalam seminggu maupun rata-rata jumlah jam belajar dalam sehari. Selama PJJ, umumnya siswa belajar 2-4 hari dalam seminggu terutama siswa pada tingkat SMP, SMA, dan SMK (Puslitjak, 2020).

Antisipasi dampak pandemi terhadap ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*) dan kesenjangan pembelajaran (*learning gap*) sebenarnya telah dilakukan

oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud/ saat ini Kemendikbudristek). Pada Agustus 2020, Kemendikbud menerbitkan kurikulum darurat pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) ini pada intinya merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum darurat dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Guru juga didorong untuk melakukan asesmen diagnostik secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif (kemampuan dan capaian pembelajaran siswa) dan kondisi non-kognitif (aspek psikologis dan kondisi emosional siswa) sebagai dampak dari PJJ. Dengan asesmen diagnostik ini diharapkan guru dapat memberikan pembelajaran yang tepat sesuai kondisi dan kebutuhan siswa mereka.

Setelah berjalan hampir satu tahun ajaran, Kemendikbud telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum darurat. Hasil evaluasi tersebut secara umum menunjukkan bahwa siswa pengguna kurikulum darurat mendapatkan hasil asesmen yang lebih baik daripada pengguna Kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosial ekonominya. Penggunaan kurikulum darurat secara signifikan juga mampu mengurangi indikasi learning-loss selama pandemi baik untuk capaian literasi maupun numerasi (lihat gambar 1).



Gambar 1. Perbandingan capaian literasi dan numerasi siswa yang menggunakan kurikulum darurat dan Kurikulum 2013 yang di kutip dari Kemendikbud Ristek

Hasil positif di atas menunjukkan bahwa intervensi kurikulum darurat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya pemulihan pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Namun disisi lain, dapat dikatakan bahwa intervensi ini merupakan kebijakan bumper untuk menanggulangi potensi *learning loss* dan *learning gap* selama pandemi. Pertengahan 2022 Kemendikbud memberikan keputusan nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran yang didalamnya termaktub 3 jenis kurikulum yang dianjurkan yaitu kurikulum 2013 secara utuh, kurikulum 2013 disederhanakan dan kurikulum merdeka sebagai alternatif pembelajaran yang direkomendasikan oleh kemendikbud. Hal itu sebagai persiapan penggunaan kurikulum merdeka di tahun 2024 secara serentak diseluruh Indonesia.

Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya keterkaitan pembelajaran dengan asesmen, terutama asesmen formatif, sebagai suatu siklus belajar. Menurut Black dan rekan-rekan (2002), asesmen formatif adalah segala bentuk asesmen yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas proses belajar peserta didik. Tujuan utamanya adalah untuk pembelajaran, bukan untuk kepentingan akuntabilitas, sertifikasi, ataupun meranking capaian peserta didik, guru, dan satuan pendidikan. Asesmen formatif dengan demikian ditentukan oleh tujuannya, bukan instrumen atau mekanismenya. Retnawati (2017) bahwa alur belajar (*learning trajectory*) juga perlu menjadi perhatian ketika merumuskan tujuan. Bentuk atau instrumen dua atau lebih asesmen bisa serupa, namun apabila tujuan salah satu asesmen tersebut untuk menentukan kenaikan kelas, misalnya, maka asesmen tersebut bukan asesmen formatif, melainkan asesmen sumatif. Oleh karena itu, Prinsip Asesmen dalam Kurikulum Merdeka tidak menekankan pada metode yang konkrit, melainkan pada tujuan serta fungsi asesmen sebagai umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Kebijakan ini selaras dengan semangat Merdeka Belajar dan prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum. Berbeda dengan Kurikulum 2013 di mana kurikulum SD menggunakan pendekatan tematik, satuan pendidikan yang menggunakan Kurikulum Merdeka memiliki keleluasaan untuk mengorganisasikan pembelajarannya, tidak lagi diarahkan untuk menggunakan

pendekatan tematik. Dengan kata lain, satuan pendidikan SD dapat menstruktur muatan pelajarannya menggunakan mata pelajaran ataupun melanjutkan penggunaan pendekatan tematik namun menyesuaikan dengan Capaian Pembelajaran.

Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan Kementerian dan Kebudayaan di beberapa daerah di tanah air, ditemukan bahwa beban pelajaran yang harus siswa tanggung terlalu banyak (Puskurbuk, 2019). Lebih lanjut, hasil paparan evaluasi pengimplementasian Kurikulum 2013 menemukan bahwa adanya kekeliruan pemahaman guru tentang konsep *mastery learning*. Kebanyakan guru masih beranggapan bahwa *mastery learning* adalah menuntaskan seluruh materi pembelajaran, sehingga malah mengesampingkan pemahaman siswa; sementara yang diharapkan Kurikulum 2013 adalah ketuntasan pemahaman siswa (Balitbang Kemdikbud, 2019). Akibatnya, peserta didik dan orang tua mengeluhkan beban pelajaran yang begitu berat. Terutama di saat ujian, siswa SD harus memahami pelajaran IPS, IPA, Matematika untuk satu ujian saja (Maharani, 2014). Demikian pula pada peserta didik PAUD yang meskipun pada K-13 tidak menjadikan kemampuan baca tulis sebagai syarat kelulusan, ternyata ketika masuk pada jenjang SD, siswa secara alamiah harus dapat membaca karena isi dari materi SD sudah cukup tinggi.

Untuk mengejar ketertinggalan akibat pandemi, guru dan satuan pendidikan tidak boleh dibebani dengan administrasi yang memberatkan. Muatan materi dalam kurikulum terlalu padat, sehingga guru lebih mengejar target terselesaikannya materi (Jaelani & Retnawati, 2016; Retnawati, Hadi, & Nugraha, 2016) sehingga tidak sempat memikirkan implementasi berbagai pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif, yang identik dengan kegiatan student centered memerlukan banyak waktu (Retnawati, Munadi, Arlinwibowo, & Wulandari, 2017). Oleh karena itu, dibutuhkan upaya agar guru dan satuan pendidikan dapat lebih leluasa dalam mengajar secara efektif dan inovatif.

Untuk mengejar ketertinggalan akibat pandemi, guru dan satuan pendidikan tidak boleh dibebani dengan administrasi yang memberatkan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya agar guru dan satuan pendidikan dapat lebih leluasa dalam

mengajar secara efektif dan inovatif. Bukan hanya itu, implementasi K-13 yang memberikan paket komplit dengan silabus dalam perjalanannya mendapatkan kritik dari banyak pihak (Ahmad, 2014). Hal ini dikarenakan tidak semua sekolah dapat menerapkan silabus yang sama antara satu dengan yang lain. Mungkin pada satu sekolah, dapat menerapkan silabus yang dibuat oleh pemerintah, namun belum tentu bagi sekolah lain. Karena konteks sekolah di desa tidak sama dengan konteks sekolah di kota. Demikian pula konteks sekolah swasta tidak akan sama dengan sekolah negeri.

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan penelitian mengenai kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum merdeka di tahun 2022. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum merdeka.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis fenomenologi. Fenomena yang dieksplorasi, dipahami dan kemudian dianalisis adalah kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum merdeka. Pemilihan informan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan yang bertujuan tentunya berdasarkan pertimbangan yang telah ditentukan. Informan Partisipan penelitian ini diwakili oleh guru SD dari wilayah Indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur Indonesia yang sudah mengimplementasikan kurikulum prototipe/merdeka. Subyek berjumlah 36 Orang yang berusia antara 24 – 58 tahun serta mengajar 1 – 38 tahun. Gambaran Demografi partisipan disajikan pada tabel 1.

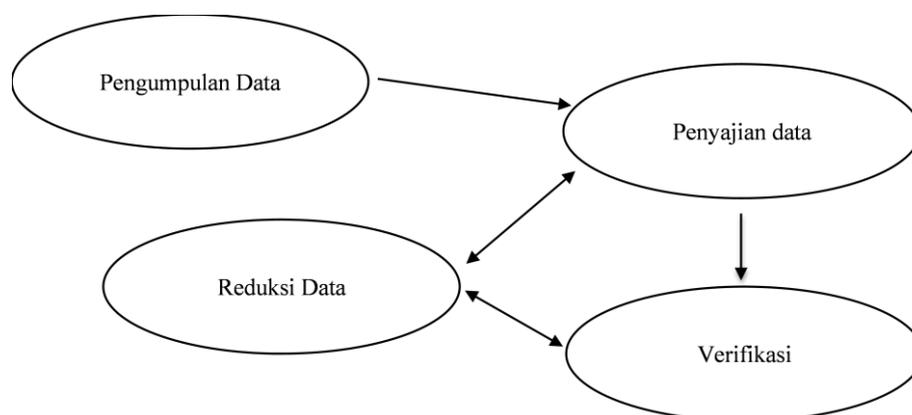
Tabel 1. Socio-Demographic Characteristics of the Respondents

No	Demographic Characteristics	Teachers	
		Total	%
<b>Gender</b>			
1.	Male	12	33.3
	Female	24	66.7
<b>Age</b>			
2.	18-40	26	72.2
	41-60	10	27.8
	>60	-	0.0
<b>Wilayah</b>			
3.	Indonesia Barat	32	88.8
	Indonesia Tengah	3	8.3
	Indonesia Timur	1	2.9

Peneliti utama mengumpulkan data melalui angket. Data dikumpulkan melalui angket dengan bantuan *google form* untuk mengeksplorasi data terkait fenomena guru dalam pelaksanaan kurikulum merdeka kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam melalui zoom meeting dan direkam untuk partisipan yang terpilih untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam.

Peserta terpilih dihubungi oleh peneliti terlebih dahulu untuk mengatur jadwal wawancara yang disepakati Bersama. Peserta diberitahukan bahwa boleh mengundurkan diri apabila tidak berkenan tanpa dikenai penalty. Kegiatan wawancara direkam serta menggunakan nama samaran sebagai bentuk perlindungan atas identitas peserta.

Teknik Analisis data dilakukan secara kualitatif bodgan dan bliken dengan tiga langkah,yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan . Hasil penyimpulan/verifikasi digunakan untuk memperoleh pemahaman terhadap kesiapan guru dalam mengujicoba/mengimplementasikan kurikulum merdeka.



Gambar 2. Teknik Analisis data bodgan dan bliken

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data hasil angket dan pendalaman wawancara diperoleh 5 kategori utama berkaitan dengan kesiapan guru mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dari semua yang mengisi angket berusia antara 24-58 tahun dari seluruh Indonesia. Angket yang terisi berjumlah 36 Angket kemudian 7 terpilih untuk dilakukan wawancara secara mendalam.

Kurikulum merupakan suatu program yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Kurikulum menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan Pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan Pendidikan. Jadi Kurikulum sejak awal harus dipahami guru agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan pemberian angket dan wawancara yang telah dilakukan kurikulum merdeka oleh Sebagian besar guru memaknai sebagai kurikulum yang focus mengembangkan kompetensi siswa sesuai dengan kodrat dan kemampuannya. Guru memaknai kurikulum merdeka sebagai kurikulum yang didesain lebih focus dan fleksibel sesuai dengan potensi siswa yang berbasis lokal sesuai kondisi sekolah/satuan Pendidikan. Guru perlu mengajarkan pembelajaran berdiferensiasi untuk melahirkan pelajar Pancasila sebagai pemulihan pembelajaran pasca Belajar Dari Rumah (BDR) dimasa Pandemi Covid 19. Ada guru juga menyampaikan bahwa masih ada guru yang belum memahami dan mengerti adanya kurikulum merdeka sebagai kurikulum baru di Indonesia.

Kurikulum merdeka merupakan kurikulum baru yang memerlukan banyak persiapan termasuk Guru. Berdasarkan hasil reduksi wawancara guru dalam menyongsong kurikulum merdeka perlu upgrade kompetensi guru serta peserta didiknya agar siap dengan kurikulum perubahan. Guru juga perlu menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan termasuk seperangkat pembelajarannya. Guru berpendapat bahwa sarana dan prasarana seperti seperangkat pembelajaran kurikulum merdeka perlu dipersiapkan lebih awal. Guru juga berpendapat bahwa Kepala sekolah dan guru perlu menyiapkan/mengupgrade kompetensi

kepribadian, pedagogik, professional dan sosial guru dalam menghadapi kurikulum merdeka. Menurut guru siswa juga perlu disiapkan untuk menghadapi kurikulum merdeka misalnya perlunya mengetahui kebutuhan siswa didalam pembelajaran.

Berdasarkan pelaksanaan AN sebelumnya persiapan yang sudah dilakukan guru untuk menerapkan kurikulum merdeka adalah mengenal kurikulum merdeka secara mendalam melalui berbagai media IT. Pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan asesmen, saat ini masih sangat jarang dilakukan oleh guru (Retnawati, Hadi, Nugraha, Arlinwibowo, Sulistyaningsih, Djidu, Apino, & Iryant, 2017). Selain itu guru juga menyampaikan bahwa yang dilakukan adalah memahami dan mempelajari kurikulum merdeka melalui sosialisasi secara daring/luring serta mencari informasi di internet dan buku. Guru juga sudah mendaftarkan sekolah sebagai sasaran kurikulum merdeka serta pesan buku ajar kurikulum merdeka. Akan tetapi ada guru yang belum mempersiapkan dengan alasan belum ada instruksi khusus.

Bantuan dan fasilitas yang sudah diterima guru dari sekolah adalah sarana dan prasarana serta memberikan pelatihan kurikulum merdeka. Guru juga disediakan bahan ajar dan peralatan TIK. Sekolah juga memberikan pelatihan kurikulum merdeka serta memberikan pemahaman dan pembelajaran mengenai kurikulum merdeka.

Bantuan yang fasilitas yang sudah diterima guru dari pemerintah adalah bantuan dana BOS serta sarana dan prasarana serta platform TIK yang mendukung penerapan kurikulum merdeka. Guru juga mendapatkan materi melalui webinar dan platform merdeka. Dukungan dari komunitas belajar guru juga diberikan dalam bentuk sosialisadi dan pemahaman.

Guru dalam mempersiapkan pelaksanaan kurikulum merdeka menemui beberapa hambatan. Sebagian besar guru menyampaikan hambatan yang ditemui guru dalam mempersiapkan pelaksanaan kurikulum merdeka adalah kurangnya perangkat pendukung, motivasi dan kompetensi guru serta dukungan dari ekosistem sekolah serta kurangnya dukungan dari berbagai pihak dalam mempersiapkan penerapan kurikulum merdeka..

Kesiapan guru untuk menerapkan kurikulum merdeka merupakan respon terhadap lingkungan sekitar untuk perubahan menjadi lebih baik. Cummings, Bridgman, & Brown (2016); Georgalis, Samaratunge, Kimberley & Lu (2015); Juliboni & Garibaldi de Hilal (2018), mengemukakan bahwa Resistensi terhadap perubahan merupakan respon terhadap proses perubahan. Jadi ketahanan seorang guru untuk adaptasi dengan lingkungan sekitar adalah actor penting didalam pembelajaran.

Komitmen anggota menurut Herold, Fedor, Caldwell, & Liu (2008) untuk berubah merupakan faktor penting untuk inisiatif perubahan meskipun keberhasilan implementasi perubahan tergantung pada para pemimpin (Faupel & Süß, 2019). Anggota dalam hal ini adalah seorang guru merupakan factor penting dalam perubahan kurikulum lama menjadi kurikulum merdeka. Guru tidak perlu memikirkan hasil yang terpenting adalah inisiatif untuk berubah. Pemimpin dalam hal ini kepala sekolah menjadi factor penting untung keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Sebagai besar guru menyampaikan bahwa Kepala sekolah juga perlu menyiapkan dan mengupgrade kompetensi kepribadian, pedagogik, professional dan sosial guru dalam menghadapi kurikulum merdeka. Hal itu sejalan dengan pemikiran Moran & Brightman, (2000) bahwa Komitmen anggota mempengaruhi tujuan, keinginan dan nilai di antara karyawan dan merupakan faktor penting dalam mendukung inisiatif perubahan (Herscovitch & Meyer, 2002).

Kurikulum merdeka oleh guru dimaknai sebagai kurikulum yang focus mengembangkan kompetensi siswa sesuai dengan kodrat dan kemampuannya. Persepsi tersebut mengamanatkan bahwa guru adalah pemegang kendali dalam proses pembelajaran yang perlu menghindari ataupun melepaskan kontrol guru kepada siswa yang sifatnya menuntut proses pembelajaran yang homogen kepada semua siswanya. Siswa perlu dikembangkan dan di tuntun untuk belajar sesuai dengan kodrat dan kemampuan yang dimiliki. Guru dewasa ini berfokus pada penyelesaian target kurikulum sehingga pembelajaran yang dilakukan guru hanya fokus pada penyelesaian materi tidak memandang kemampuan unik yang dimiliki siswa. Pritchett & Beatty (2015) menunjukkan bahwa di beberapa negara

berkembang seperti Indonesia, materi pelajaran yang begitu padat membuat guru terus bergerak cepat menyelesaikan bab demi bab, konsep demi konsep, tanpa memperhitungkan kemampuan siswa memahami konsep yang telah dipelajarinya. Menurut temuan mereka, hal ini bukan karena guru tidak menghiraukan kemampuan anak dalam belajar, tetapi karena mereka dituntut untuk menuntaskan materi ajar.

Guru dalam menyongsong kurikulum merdeka perlu upgrade kompetensi guru supaya siswa dan guru siap dengan kurikulum perubahan. Guru juga perlu menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan termasuk seperangkat pembelajarannya mengenal kurikulum merdeka secara mendalam melalui berbagai media. Implementasi kurikulum serta proses pemaknaan kebijakan pada hakikatnya adalah proses belajar. Namun kali ini yang belajar bukanlah siswa melainkan satuan pendidikan, pendidik, dan juga pemerintah daerah dan seperti halnya peserta didik adalah pusat dari proses belajar di kelas, guru juga perlu menjadi pusat dari implementasi kurikulum (Drake dan Sherin, 2006).

Prinsip pembelajaran sesuai dengan tahap capaian peserta didik (*teaching at the right level*) juga perlu diberlakukan dalam proses implementasi yang sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan dan guru (*implementation at the right level*). Guru sebagai agen dalam implementasi kurikulum perlu mempelajari dan memaknainya tidak saja akan membantu siswa belajar lebih baik, tetapi juga membantu guru belajar secara mendalam kebijakan kurikulum sehingga mereka dapat menerapkannya dengan lebih baik dan bertahan lama (*sustainable*) (Ball & Cohen, 1996; Drake & Sherin, 2006). Dengan menempatkan guru sebagai pusat implementasi kurikulum, strategi implementasi suatu kebijakan perlu secara jelas menyatakan perubahan praktik dan perilaku apa yang diharapkan dari guru (Fullan, 2007). Hal ini serupa dengan prinsip pembelajaran di mana guru menentukan tujuan pembelajaran untuk peserta didik mereka.

Bantuan dan fasilitas yang sudah diterima guru dari sekolah adalah sarana prasarana, dan pelatihan kurikulum merdeka. Bantuan tersebut diperoleh dari sekolah dan pemerintah. Bantuan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah tingkat SD tidak selengkap yang dimiliki oleh sekolah jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan informasi dari hasil reduksi wawancara dan angket menyatakan bahwa saran dan prasarana menggunakan perangkat yang dibeli menggunakan BOS dari pemerintah. Pelatihan kurikulum yang diterima didapatkan dari webinar yang diberikan oleh pemerintah.

Kurikulum merdeka merupakan kurikulum baru yang akan diterapkan pada tahun pelajaran 2022/2023. Penerapan kurikulum tersebut perlu dilakukan persiapan oleh semua ekosistem sekolah secara adil. Guru sebagai actor utama yang bersinggungan langsung dengan siswa perlu memahami betul esensi kurikulum merdeka. Komitmen anggota dalam mempengaruhi tujuan, keinginan dan nilai di antara karyawan (Moran & Brightman, 2000) dan merupakan faktor penting dalam mendukung inisiatif perubahan (Herscovitch & Meyer, 2002). Jadi Ekosistem sekolah sebagai anggota merupakan factor penting dalam mendukung inisiatif perubahan. Lebih lanjut Guru akan mengembangkan sikap positif terhadap perubahan proses organisasi jika mereka melihat perubahan secara adil (Carter, Armenakis, Feild, & Mossholder, 2012; Georgalis et al., 2015). Persepsi keadilan mempengaruhi komitmen anggota untuk berubah; ketika perubahan dianggap adil, anggota lebih bersedia untuk mendukung dan bekerja untuk merangkulnya (Fedor et al., 2006).

Sebagian besar guru menyampaikan bahwa hambatan yang dialami adalah dukungan ekosistem sekolah seperti kepala sekolah, tenaga kependidikan, komite sekolah dan orang tua/wali siswa dibutuhkan guru untuk Bersama-sama mempersiapkan penerapan kurikulum merdeka masih kurang. Jadi harapan guru adalah Ekosistem sekolah secara bergotong royong dengan adil Bersama-sama mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan tugas dan peranya masing masing secara adil.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang didapatkan adalah pemahaman guru berkaitan dengan kurikulum merdeka sebagai kurikulum yang didesain lebih focus dan fleksibel sesuai dengan pontensi siswa menyesuaikan dengan kondisi satuan Pendidikan. Ada juga guru yang belum memahami dan mengerti adanya kurikulum merdeka.

Persiapan yang dilakukan guru sejauh ini mengenal kurikulum merdeka secara mendalam melalui berbagai media serta mengikuti sosialisasi secara luring maupun daring. Ada guru sudah mendaftarkan sekolahnya serta pesan buku ajar kurikulum merdeka sebagai bentuk persiapan menerapkan kurikulum merdeka di sekolah. Hambatan yang dihadapi oleh guru dalam mempersiapkan penerapan kurikulum merdeka adalah kurangnya perangkat pendukung, motivasi dan kompetensi diri guru serta dukungan dari ekosistem sekolah. Ekosistem sekolah secara bergotong royong dengan adil bersama-sama mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan tugas dan perannya masing masing mempersiapkan penerapan kurikulum merdeka

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aeini, khurotul. (2019). the Implementation of Curriculum 2013 Revision on Lesson Plans Made By English Teachers of Sman 2 Magelang in School Year 2018/2019. *Journal of Research on Applied Linguistics, Language, and Language Teaching*, 2(1), 17–23. <https://doi.org/10.31002/jrlt.v2i1.424>
- Ahmad, S. (2014). Problematika Kurikulum 2013 dan Kepemimpinan Instruksional Kepala Sekolah. *Jurnal Pencerahan*, 8(2012), 98–108.
- Ball, D. L., & Cohen, D. K. (1996). of What Is-or Instructional Reform? *Educational Research*, 25(9), 6–8.
- Carter, M. Z., Armenakis, A. A., Feild, H. S., & Mossholder, K. W. (2012). Transformational leadership, relationship quality, and employee performance during continuous incremental organizational change. *Journal of Organizational Behavior*, 34(7), 942–958.
- Cummings, S., Bridgman, T., & Brown, K. G. (2016). Unfreezing change as three steps: Rethinking Kurt Lewin’s legacy for change management. *Human Relations*, 69(1), 33–60. <https://doi.org/10.1177/0018726715577707>
- Drake, C., & Sherin, M. G. (2006). Practicing change: Curriculum adaptation and teacher narrative in the context of mathematics education reform. *Curriculum Inquiry*, 36(2), 153–187. <https://doi.org/10.1111/j.1467-873X.2006.00351.x>

- Faupel, S., & Süß, S. (2019). The Effect of Transformational Leadership on Employees During Organizational Change—An Empirical Analysis. *Journal of Change Management*, 19(3), 145–166. <https://doi.org/10.1080/14697017.2018.1447006>
- Fedor, D. B., Caldwell, S., & Herold, D. M. (2006). The effects of organizational changes on employee commitment. *Personnel Psychology*, 59(1), 1–29. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1744-6570.2006.00852.x>
- Fullan, M. (2007). *The New Meaning of Educational Change* (4th ed.). Teacher Collage.
- Georgalis, J., Samaratunge, R., Kimberley, N., & Lu, Y. (2015). Change process characteristics and resistance to organisational change: The role of employee perceptions of justice. *Australian Journal of Management*, 40(1), 89–113. <https://doi.org/10.1177/0312896214526212>
- Herold, D. M., Fedor, D. B., Caldwell, S., & Liu, Y. (2008). The Effects of Transformational and Change Leadership on Employees' Commitment to a Change: A Multilevel Study. *Journal of Applied Psychology*, 93(2), 346–357. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.93.2.346>
- Herscovitch, L., & Meyer, J. P. (2002). Commitment to organizational change: Extension of a three-component model. *Journal of Applied Psychology*, 87(3), 474–487. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.3.474>
- Jaelani, & Retnawati, H. (2016). The Challenges of Junior High School Mathematics Teachers in Implementing the Problem-Based Learning for Improving the Higher-Order thinking Skills The academic Motivation Levels in Turkish Middle Schools Ümit MORSÜN BÜL The Relations between Personal Grow. *The Online Journal of Counseling and Education*, 5(3), 1–13.
- Juliboni, M. C., & Garibaldi de Hilal, A. V. (2018). Organizational change in a scenario of political upheaval and economic crisis: a Brazilian case. *Management Research Review*, 41(10), 1118–1136. <https://doi.org/10.1108/MRR-01-2017-0003>

- Kementerian Keuangan. (2021). *Usaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui mandatory spending anggaran pendidikan*. Kementerian Keuangan. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/usaha-meningkatkan-kualitas-pendidikanmelalui-mandatory-spending-anggaranpendidikan->
- Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022., (2022). [https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/upload/download-center/PP No 4 Tahun 2022\\_1649770131.pdf](https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/upload/download-center/PP_No_4_Tahun_2022_1649770131.pdf)
- Maharani, E. (2014). *Beban kurikulum 2013 terlalu berat*. Republika. <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/14/10/14/ndeg5abeban-kurikulum-2013-terlalu-berat>
- Moran, J. W., & Brightman, B. K. (2000). Leading organizational change. *Journal of Workplace Learning*, 12(2), 66–74. <https://doi.org/10.1108/13665620010316226>
- Pritchett, L., & Beatty, A. (2015). Slow down, you're going too fast: Matching curricula to student skill levels. *International Journal of Educational Development*, 40(2015), 276–288. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2014.11.013>
- Puskurbuk. (2019). *Kajian pengembangan dan implementasi kurikulum 2013*. Puskurbuk.
- Puslitjak. (2020). *Risalah kebijakan mengatasi resiko belajar dari rumah*. Pusat Penelitian Kebijakan. [https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/front\\_2021/produk/risalah\\_kebijakan/detail/313437/mengatasi-risiko-belajar-darirumah](https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/front_2021/produk/risalah_kebijakan/detail/313437/mengatasi-risiko-belajar-darirumah)
- Retnawati, H. (2017). Learning trajectory of item response theory course using multiple softwares. *Olympiads in Informatics*, 11, 123–142. <https://doi.org/10.15388/ioi.2017.10>
- Retnawati, H., Hadi, S., & Nugraha, A. C. (2016). Vocational high school teachers' difficulties in implementing the assessment in curriculum 2013 in Yogyakarta Province of Indonesia. *International Journal of Instruction*, 9(1), 33–48. <https://doi.org/10.12973/iji.2016.914a>

- Retnawati, H., Hadi, S., Nugraha, A. C., Arlinwibowo, J., Sulistyarningsih, E., Djidu, H., Apino, E., & Iryanti, H. D. (2017). Implementing the computer-based national examination in Indonesian schools: The challenges and strategies. *Problems of Education in the 21st Century*, 75(6), 612–633. <https://doi.org/10.33225/pec/17.75.612>
- Retnawati, H., Munadi, S., Arlinwibowo, J., Wulandari, N. F., & Sulistyarningsih, E. (2017). Teachers' difficulties in implementing thematic teaching and learning in elementary schools. *New Educational Review*, 48(2), 201–212. <https://doi.org/10.15804/tner.2017.48.2.16>
- Telaumbanua, Y. (2014). Analisis Permasalahan Implementasi Kurikulum 2013. *Journal Polingua*, 3(1), 83–105.